
Peningkatan Profesionalisme Pasukan Khusus Guna Mendukung Operasi Gabungan TNI dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI

(The Improvement of Professionalism of the Indonesian Armed Forces Special Forces to Support Joint Operations of the Indonesian Armed Forces to Protect the Sovereignty of the Republic of Indonesia)

Rivelson Saragih, Sunarko, Evik Merdiyana
rivelsonsaragih44@gmail.com, sunarko@gmail.com

^{1,2}Universitas Pertahanan, ³Sesko TNI

Abstrak. Pasukan khusus TNI, seperti Sat-81 Gultor TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Sat Bravo TNI AU, memiliki peran penting dalam melaksanakan operasi yang memerlukan keterampilan khusus, terutama dalam pengamanan objek vital nasional seperti kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Penelitian ini menyoroti urgensi pengembangan regulasi yang jelas mengenai keterlibatan pasukan khusus dalam operasi gabungan, serta perlunya peningkatan kualitas pelatihan, kerjasama antar-satuan, dan penerapan teknologi modern untuk mendukung tugas-tugas mereka. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang tepat dan peningkatan profesionalisme pasukan khusus TNI dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas operasi gabungan TNI, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional di wilayah berisiko tinggi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan TNI dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan kemampuan pasukan khusus dalam menjaga kedaulatan negara.

Kata kunci: Kedaulatan NKRI, Operasi Gabungan, Pasukan Khusus TNI, Profesionalisme, Pengamanan Kedutaan Besar.

Abstract. *Enhancing the professionalism of the TNI Special Forces to support TNI joint operations in maintaining the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). TNI Special Forces, such as Sat-81 Gultor, Denjaka and Sat Bravo, play a crucial role in carrying out operations that require specialized skills, particularly in securing vital national assets such as Indonesian embassies abroad. This study highlights the urgency of developing clear regulations regarding the involvement of special forces in joint operations, as well as the need to improve the quality of training, inter-unit cooperation, and the application of modern technology to support their tasks. The methodology used is a qualitative descriptive approach, with in-depth interviews as the data collection technique. The results indicate that appropriate regulations and the enhancement of TNI Special Forces professionalism can significantly improve the effectiveness of TNI joint operations, as well as strengthen national defense and security in high-risk areas. This research also provides recommendations for the government and TNI in formulating policies that support the development of special forces' capabilities in safeguarding national sovereignty.*

Keywords: *Embassy Security, Joint Operations, NKRI Sovereignty, TNI Special Forces, Professionalism.*

1. Pendahuluan

Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk meningkatkan profesionalisme pasukan khusus TNI dalam Operasi Gabungan TNI, guna menjaga keamanan kedutaan dan kedaulatan NKRI. Dalam era globalisasi dan tantangan keamanan yang semakin kompleks, menjaga kedaulatan dan kepentingan negara di luar negeri menjadi suatu keharusan. Peristiwa serangan teroris di Benghazi, Libya, pada 11 September 2012, menunjukkan betapa

krusialnya keamanan diplomatik dalam melindungi fasilitas dan personel negara. Kasus tersebut menyoroti pentingnya respons cepat dan penguatan keamanan untuk mencegah kejadian serupa. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan potensi strategis, memerlukan sistem pertahanan yang solid. Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan berbagai satuan khususnya, memainkan peran vital dalam menjaga kedaulatan negara. Melalui peningkatan profesionalisme prajurit khusus TNI, diharapkan dapat mendukung efektivitas operasi gabungan dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, baik di dalam maupun luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi yang diperlukan serta dampaknya terhadap profesionalisme pasukan khusus TNI, dengan fokus pada pengamanan kedutaan besar dan operasi gabungan TNI.

2. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana dijelaskan dalam UU RI No 3 Tahun 2002, menggarisbawahi pentingnya partisipasi seluruh warga negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Pertahanan negara mencakup kebijakan, strategi, teknologi, dan logistik yang mendukung ketahanan. Ilmu pertahanan sendiri melibatkan studi komprehensif untuk menghadapi ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Teori ancaman. Teori ini menjadi elemen penting dalam studi pertahanan dan keamanan nasional. Ancaman dapat bersifat militer, non-militer, atau internal yang mengganggu stabilitas negara. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis ancaman, strategi yang tepat dapat dirumuskan. Dalam pandangan realisme, ancaman muncul akibat persaingan kekuasaan antar negara, sementara teori keamanan manusia memandang ancaman dari sudut individu dan masyarakat. Pentingnya ancaman global juga ditekankan untuk merespons fenomena lintas batas seperti perubahan iklim dan terorisme.

Teori kekuatan militer. Teori ini membahas peran militer dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan stabilitas internasional. Waltz menekankan bahwa kekuatan militer yang seimbang di antara negara-negara besar dapat mencegah konflik global. Sementara itu, Mearsheimer menunjukkan bahwa negara dengan kekuatan militer dominan seringkali memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional. Pentingnya kekuatan militer tidak hanya terletak pada aspek fisik, tetapi juga pada kekuatan lunak yang dapat mempengaruhi negara lain melalui diplomasi dan budaya.

Teori keamanan nasional. Teori ini menyoroti upaya untuk menjaga kelangsungan hidup negara dari berbagai ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Nye memperluas konsep keamanan dengan menekankan pentingnya kekuatan lunak dalam mencapai keamanan nasional. Diplomasi dan pengaruh budaya menjadi bagian integral dari strategi pertahanan, memungkinkan negara mencapai stabilitas tanpa menggunakan kekuatan militer.

Teori optimalisasi. Teori ini memberikan kerangka untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya negara guna mencapai keamanan yang efektif. Teori ini melibatkan penggunaan strategi dan alat pertahanan yang paling efisien dalam menghadapi ancaman. Dalam konteks ini, teknologi dan modernisasi alutsista menjadi krusial, serta manajemen yang baik atas sumber daya manusia dan material untuk mempertahankan keamanan negara secara optimal.

Teori kompetensi sumber daya manusia (SDM). Teori ini mendefinisikan pentingnya pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku untuk memastikan efektivitas individu dan organisasi. Dalam konteks pertahanan, teori ini digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM militer melalui pelatihan dan pendidikan. Kompetensi SDM berperan besar dalam memastikan kesiapan dan kemampuan profesional dalam menghadapi tantangan operasional.

Teori manajemen sumber daya. Teori ini berfokus pada pengelolaan SDM yang efektif dalam mencapai tujuan strategis pertahanan. Dengan pengelolaan kinerja yang baik, termasuk umpan balik yang konstruktif dan penetapan tujuan yang jelas, pasukan militer dapat berfungsi lebih efisien dan profesional. Ini juga membantu mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi peningkatan profesionalisme dan kinerja di medan operasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu pendekatan untuk melakukan penelitian didasari filosofis bahwa kebenaran diperoleh dari cara menangkap gejala (fenomena) dari objek yang akan diteliti, yang nantinya akan diinterpretasikan oleh peneliti. Masalah pada mulanya sangat umum, dirumuskan agar mendapat fokus yang ditujukan pada hal-hal yang spesifik, dan sifatnya masih dapat berubah. Instrumen penelitian tidak bersifat objektif melainkan subyektif peneliti, yaitu peneliti itu sendiri karena penelitian kualitatif pada hakikatnya seorang peneliti adalah instrumen (human instrument) (Cresswell, 2017).

4. Hasil dan Pembahasan

Peningkatan profesionalisme Pasukan Khusus TNI dalam mendukung efektivitas operasi gabungan TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI, baik dalam operasi militer di dalam negeri maupun pengamanan objek vital nasional di luar negeri, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Mengingat meningkatnya ancaman keamanan global, penugasan Pasukan Khusus TNI untuk melindungi personel diplomatik dan aset negara di wilayah-wilayah rawan menjadi semakin penting. Penelitian ini menggambarkan kemampuan teknis, taktis, dan strategis Pasukan Khusus TNI dalam menjalankan tugas di lingkungan internasional yang berisiko tinggi, serta memberikan acuan bagi Mabes TNI dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang relevan untuk peningkatan profesionalisme Pasukan Khusus TNI.

Penelitian ini juga menganalisis kebutuhan dan tantangan dalam pengamanan KBRI di negara-negara rawan, dengan menekankan pentingnya implementasi aturan yang tepat dan dukungan pelatihan serta teknologi untuk memastikan optimalisasi penugasan Pasukan Khusus. Melalui kajian ini, diharapkan Mabes TNI dan Kementerian Luar Negeri dapat menyusun strategi pengamanan obyek vital nasional di luar negeri secara lebih efektif, sehingga kehadiran Pasukan Khusus TNI dapat berperan signifikan dalam menjaga keamanan, martabat, dan kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional.

Pengamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pretoria, Afrika Selatan, berada dalam kondisi rawan terkendali. Atase Pertahanan (Athas) Pretoria melakukan penilaian ancaman dan menyiapkan rencana kontingensi termasuk evakuasi WNI dan diplomat jika ancaman meningkat. Saat ini belum ada personel Pasukan Khusus TNI yang bertugas di KBRI Pretoria maupun di KBRI lain di Afrika Selatan, seperti Nairobi, Harare, dan Maputo. Diharapkan kehadiran Pasukan Khusus TNI di masa depan dapat memperkuat sistem pengamanan melalui berbagai tugas, seperti pemantauan keamanan, penanganan ancaman teroris, serta pengawalan dan konvoi.

Di Iran, meskipun situasi di Tehran masih stabil, dinamika geopolitik kawasan yang melibatkan Iran dalam konflik internasional membuat pengamanan KBRI sangat penting. Polisi Diplomatik Iran saat ini bertanggung jawab atas keamanan KBRI dengan jumlah personel terbatas. Rencana kontingensi telah disiapkan, namun belum mencakup peran Pasukan Khusus TNI karena personel TNI belum ditempatkan di sana. Kehadiran Pasukan Khusus TNI diharapkan dapat membantu meningkatkan pengamanan dengan keahlian dalam bela diri, senjata, dan teknologi, terutama dalam situasi darurat.

KBRI Phnom Penh di Kamboja saat ini menikmati situasi keamanan yang baik karena berada di area yang dijaga oleh Pasukan Pengamanan Perdana Menteri Kamboja. KBRI Phnom Penh juga bekerja sama dengan pihak keamanan lokal dan menggunakan jasa satpam untuk pengamanan. Rencana kontingensi telah disiapkan dengan memanfaatkan otoritas keamanan setempat, namun kehadiran Pasukan Khusus TNI diharapkan dapat memperkuat pengamanan lebih lanjut, khususnya dalam menghadapi ancaman keamanan yang mendadak dan memberikan evaluasi berkelanjutan terhadap potensi kerawanan.

KBRI Hanoi di Vietnam berada di lingkungan yang stabil secara politik, dengan tingkat kriminalitas yang rendah. Meskipun demikian, KBRI tetap melakukan peningkatan pengamanan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat dan memanfaatkan teknologi seperti CCTV. Hingga saat ini, belum ada kehadiran Pasukan Khusus TNI di KBRI Hanoi karena tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Namun, Atase Pertahanan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memastikan keamanan tetap terjaga.

Di Papua Nugini, KBRI Port Moresby berada dalam kondisi aman namun rawan terkendali, terutama terkait pencurian di fasilitas kedutaan. Pasukan Khusus TNI sudah ditempatkan di KBRI Port Moresby dan dianggap sangat berperan dalam menjaga keamanan personel dan fasilitas diplomatik, serta membantu dalam evakuasi WNI jika diperlukan. Kehadiran mereka meningkatkan rasa aman di kalangan staf kedutaan, dan mereka juga berperan dalam memberikan masukan teknis pengamanan serta bekerja sama erat dengan otoritas keamanan lokal.

Profesionalisme Pasukan Khusus TNI merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung berbagai operasi gabungan, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan pelatihan intensif yang mencakup fisik, mental, dan taktis, Pasukan Khusus TNI siap menghadapi kondisi ekstrem dan situasi yang tak terduga, seperti penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, serta pengamanan diplomatik. Kemampuan operasional mereka terbukti dalam berbagai misi nasional dan internasional, sementara etos kerja mereka yang kuat, disiplin tinggi, dan reaksi cepat dalam menghadapi situasi krisis menjadikan Pasukan Khusus sebagai komponen krusial dalam pertahanan nasional. Kehadiran mereka dalam pengamanan KBRI di luar negeri dapat menciptakan efek jera bagi potensi ancaman, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi situasi darurat yang mungkin membahayakan diplomat dan WNI.

Selain fungsi pengamanan, peran Pasukan Khusus TNI juga memberikan dampak diplomatik yang signifikan. Keterlibatan mereka dalam pengamanan kedutaan besar memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dengan menunjukkan komitmen serius dalam melindungi misi diplomatik. Hal ini juga membutuhkan koordinasi erat dengan otoritas keamanan setempat untuk menghindari gesekan diplomatik. Pasukan Khusus tidak hanya berfokus pada keamanan fisik, tetapi juga berperan dalam kerjasama internasional, pemeliharaan perdamaian, serta perlindungan WNI. Oleh karena itu, penugasan Pasukan Khusus TNI dalam pengamanan KBRI adalah langkah strategis yang memperkuat keamanan dan diplomasi Indonesia di tingkat global.

Peran Pasukan Khusus TNI dalam pengamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri sangat penting dalam menjaga diplomat, WNI, dan fasilitas diplomatik dari berbagai ancaman, seperti terorisme dan kejahatan internasional. Dalam wawancara dengan Kolonel Laut (P) Rubiyantoro Murniawan, M.M., M. Tr.OpsIa, disebutkan bahwa penugasan Pasukan Khusus TNI tidak hanya meningkatkan keamanan kedutaan, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara tuan rumah. Pasukan Khusus TNI memiliki kemampuan taktis dalam penanggulangan terorisme dan situasi berbahaya lainnya, yang sangat vital dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan keselamatan personel diplomatik dan WNI. Keahlian mereka, seperti yang dimiliki Sat-81 Gultor, memungkinkan penanganan insiden secara efisien, termasuk pembebasan sandera dan evakuasi darurat.

Kebutuhan penugasan Pasukan Khusus TNI di KBRI semakin mendesak, terutama di negara-negara dengan ketidakstabilan politik atau zona konflik. Keberadaan personel pasukan khusus di KBRI dapat meningkatkan rasa aman, baik bagi diplomat maupun WNI. Informan dari Satbravo 90 Kopasgat menekankan bahwa pasukan ini siap menghadapi potensi ancaman dengan pelatihan khusus, peralatan canggih, dan latihan bersama pasukan khusus negara lain. Hubungan antara Atase Pertahanan (Athn) dan satuan keamanan lokal juga penting untuk memastikan koordinasi yang baik dalam penanganan situasi darurat. Mereka saling mendukung dalam hal logistik, intelijen, dan pelatihan, yang memastikan operasi pengamanan berjalan lancar.

Dansat 81 Gultor juga menekankan bahwa kehadiran pasukan khusus sangat penting dalam melindungi fasilitas dan personel diplomatik, termasuk pejabat VIP. Dalam situasi darurat, operasi evakuasi dan penyelamatan menjadi prioritas utama. Pasukan khusus harus mampu merespons ancaman dengan cepat dan efektif, serta mengelola krisis melalui komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat di bawah tekanan. Selain itu, kemampuan pengumpulan dan analisis intelijen memainkan peran penting dalam memastikan keamanan KBRI dengan memberikan informasi yang akurat tentang potensi ancaman.

Pelatihan dan konsultasi kepada staf kedutaan juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi situasi darurat. Kerja sama dengan otoritas keamanan lokal di negara tuan rumah membantu meningkatkan efektivitas pengamanan. Pasukan khusus TNI di kedutaan besar tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai elemen penting dalam diplomasi pertahanan, yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi kepentingannya di luar negeri. Di wilayah dengan tingkat ketidakstabilan tinggi, seperti Suriah dan Libya, kehadiran pasukan khusus menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan perlindungan maksimal.

Secara keseluruhan, penugasan Pasukan Khusus TNI di KBRI menjadi bagian penting dari strategi pengamanan nasional di luar negeri, terutama dalam menghadapi ancaman global yang semakin meningkat. Mereka tidak hanya menyediakan lapisan keamanan tambahan tetapi juga memainkan peran signifikan dalam menjaga hubungan diplomatik, kerjasama keamanan, dan stabilitas di wilayah-wilayah yang rawan konflik.

Pengamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri merupakan elemen penting dalam menjaga keselamatan diplomat, personel, serta fasilitas diplomatik dari berbagai ancaman, baik terorisme, kejahatan internasional, maupun ketidakstabilan politik. Peran Pasukan Khusus TNI, seperti Kopassus, Koopssus, dan Sat-81 Gultor, menjadi krusial dalam menghadapi situasi krisis dan ancaman yang kompleks. Dengan pelatihan yang intensif dan spesifik dalam penanganan krisis, pengumpulan intelijen, serta kemampuan anti-teror, Pasukan Khusus TNI siap melindungi aset vital negara di luar negeri, termasuk KBRI, dari ancaman yang tidak dapat ditangani oleh pasukan keamanan konvensional (Puspen TNI, 2024).

Keberadaan Pasukan Khusus TNI di kedutaan besar juga merupakan bagian penting dalam memperkuat operasi gabungan antar matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sinergi antara berbagai matra ini memungkinkan pengamanan KBRI dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi, terutama dalam merespons ancaman teroris dan situasi darurat. Dalam konteks operasi gabungan, pengumpulan dan pemanfaatan intelijen menjadi aspek penting untuk mencegah ancaman lebih awal, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Operasi gabungan ini juga mencerminkan profesionalisme Pasukan Khusus TNI dalam melindungi kedaulatan negara (Achmad & Santosa, 2023).

Tabel 1 Data Kehadiran Pasukan Khusus TNI di Luar Negeri

Kode	Negara	Pasukan Khusus TNI di LN	Keterangan
A5	Afrika Selatan	Tidak Ada	-
A6	Iran	Tidak Ada	-
A7	Kamboja	Tidak Ada	-
A9	Vietnam	Tidak Ada	-
A8	Papua Nugini	Ada	Perwakilan Kabul dan Port Moresby

Sumber: Peneliti (2024)

Selain itu, pengamanan kedutaan besar oleh Pasukan Khusus TNI berperan dalam meningkatkan profesionalisme militer Indonesia. Tugas pengamanan diplomatik memerlukan kompetensi yang tinggi, termasuk keterampilan dalam penanganan krisis, teknologi pengawasan, serta komunikasi lintas budaya. Melalui pelatihan berkelanjutan dan penggunaan teknologi canggih, Pasukan Khusus TNI terus memperbarui kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman global yang semakin kompleks. Kolaborasi dengan pasukan keamanan lokal dan internasional juga memberikan kesempatan untuk belajar dari praktik terbaik, yang secara langsung meningkatkan standar operasional dan profesionalisme prajurit TNI.

Lebih jauh lagi, pengamanan kedutaan besar oleh Pasukan Khusus TNI tidak hanya berdampak pada keamanan nasional tetapi juga memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di kancah internasional. Kehadiran pasukan khusus di kedutaan besar menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi kepentingan diplomatiknya serta memberikan sinyal tegas kepada negara lain bahwa Indonesia siap menghadapi ancaman global. Pengamanan yang efektif ini mendukung kelancaran misi diplomatik dan memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tuan rumah, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan keamanan internasional (Putro et al., 2022).

Secara keseluruhan, penugasan Pasukan Khusus TNI dalam pengamanan KBRI adalah langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan profesionalisme militer, tetapi juga memperkuat operasi gabungan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dalam konteks keamanan global yang dinamis, kehadiran Pasukan Khusus TNI di KBRI memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri (Ramadhan, 2018).

Pengamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri oleh Pasukan Khusus TNI merupakan langkah strategis untuk menjamin keselamatan personel diplomatik dan melindungi kepentingan nasional. Ancaman yang dihadapi KBRI sangat beragam, mulai dari serangan teroris, spionase, hingga kriminalitas seperti penculikan dan perampokan. Oleh karena itu, implementasi pengamanan oleh Pasukan Khusus TNI, seperti Kopassus dan Koopsus, sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut. Pasukan ini memiliki keahlian dalam intelijen, penanggulangan terorisme, evakuasi, serta bekerja sama dengan pasukan keamanan negara tuan rumah untuk meningkatkan efektivitas pengamanan (Hadi, 2021).

Optimalisasi Pasukan Khusus TNI dalam pengamanan KBRI tidak hanya terfokus pada kekuatan fisik, tetapi juga melalui manajemen sumber daya manusia (SDM) yang tepat. Penguatan kompetensi SDM, termasuk pemahaman hukum internasional, kemampuan bahasa, dan pemahaman budaya negara tuan rumah, menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengamanan. Pelatihan berkelanjutan serta pendidikan yang berorientasi internasional dapat meningkatkan profesionalisme dan kesiapan Pasukan Khusus TNI dalam menjalankan tugas pengamanan di luar negeri (Fauzi, 2020; Hidayat, 2021).

Selain itu, implementasi teknologi modern dalam sistem keamanan KBRI juga menjadi elemen kunci. Penggunaan teknologi pengawasan dan intelijen berbasis digital memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman. Pasukan Khusus TNI perlu dilengkapi dengan perangkat canggih untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam merespons situasi darurat dengan cepat dan tepat. Teknologi ini juga harus didukung dengan pelatihan yang memadai agar personel TNI mampu memanfaatkannya secara efektif (Susanto, 2022).

Kolaborasi internasional dengan negara tuan rumah dan lembaga keamanan global juga memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pengamanan KBRI. Pasukan Khusus TNI dituntut untuk memiliki keterampilan diplomasi dan kemampuan interpersonal yang baik agar dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga stabilitas keamanan kedutaan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kapasitas TNI di luar negeri, termasuk alokasi anggaran untuk pelatihan dan teknologi, juga menjadi aspek penting dalam optimalisasi pengamanan (Sari, 2019; Yudhie, 2022).

Secara keseluruhan, optimalisasi pengamanan KBRI oleh Pasukan Khusus TNI merupakan sinergi antara manajemen SDM yang baik, pemanfaatan teknologi canggih, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Penguatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, penggunaan teknologi modern, serta dukungan kebijakan pemerintah akan memastikan bahwa TNI mampu menjawab tantangan keamanan yang kompleks di luar negeri, sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional (Ramadhan, 2023).

5. Kesimpulan dan Saran

Pengamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia oleh Pasukan Khusus TNI, seperti Kopassus dan Koopssus, merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Dengan pelatihan intensif yang mencakup penanggulangan krisis, operasi anti-teror, dan evakuasi, pasukan khusus TNI memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai ancaman, baik teroris maupun kriminal. Meskipun peran mereka krusial, masih terdapat kekurangan dalam penempatan personel pasukan khusus TNI di beberapa kedutaan besar, yang menuntut peningkatan kehadiran mereka di luar negeri untuk memperkuat keamanan diplomatik Indonesia.

Pengamanan oleh Pasukan Khusus TNI juga berkontribusi pada peningkatan profesionalisme militer. Melalui tugas pengamanan yang spesifik, seperti penggunaan teknologi canggih untuk pengawasan dan komunikasi, serta kolaborasi dengan pasukan keamanan internasional, kemampuan prajurit TNI terus berkembang. Latihan dan pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga standar operasional yang tinggi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat di luar negeri.

Dengan demikian maka implementasi pengamanan kedutaan besar yang efektif oleh Pasukan Khusus TNI tidak hanya melindungi kepentingan diplomatik Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi negara di kancah internasional. Dengan adanya kerja sama internasional yang baik, pengembangan teknologi, dan peningkatan profesionalisme melalui pelatihan, Pasukan Khusus TNI dapat berperan lebih optimal dalam menjaga keamanan nasional dan memastikan kedutaan besar berfungsi secara efektif sebagai representasi resmi negara di luar negeri.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, J., & Evancho, J., (2019), *National Security Strategy: Key Issues to Consider*, The Cipher Brief.
- Armawi, A., (2019), *Eksistensi TNI dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Nirmiliter Multidimensional di Era Milenial*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Edisi Khusus 2019.
- Purwanto, S., Supangat, S., Esterina, M., Souhoka, S., Chandra, F., & Hariputra, A. & Arianto, T.(2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.*
- Purwanto, S., Ardiansyah, M., Januru, L., Anami, Z., Putri, N. A. S. M., Gunadi, I., ... & Hastriana, U. S. (2025). *Pengembangan Karier dan Kompetensi SDM*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Tippe, S., (2016), *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Humanika

2. Jurnal

- Amrulloh, M. H., Purwanto, S., Hutajulu, B., & Siagian, F. (2025). Strategi Kodam XVII/Cenderawasih dalam Pemenuhan Personel guna Mendukung Kesiapan Operasi di Papua. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 16-32.

- Gunawan, A., (2016), Kompetensi Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 18(1), 77-84.
- Hidayah, N., (2017), Analisis Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013, *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1), 10-20.
- Kurniasih, R., dkk., (2018), Pengaruh Kompetensi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(2), 87-96.
- Prabowo, S., & Haribowo, (2016), Operasi Gabungan: Konsep dan Implementasinya dalam Lingkup Pertahanan Indonesia, *Jurnal Pertahanan*, 2(1).
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *POWER*, 2(1), 80-86.
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Wolfers, A., (1952)., The Concept of National Security, *Political Science Quarterly*, 67(4).

3. Perundang-undangan

- Pemerintah RI, (2004), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Pemerintah Indonesia, (2007), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Terdepan.
- Pemerintah RI, (2022), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara.
- Kemhan RI. (2018), Kebijakan Pertahanan Negara 2018.